

**PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) DAN
INVESTASI SWASTA TERHADAP PENYERAPAN TENAGA
KERJA DAN DAMPAKNYA PADA PDRB (ADHK)
DI KOTA MANADO TAHUN 2003-2012**

Dasri Lokiman, Debby Ch. Rotinsulu dan Antonius Y. Luntungan

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan
Universitas Sam Ratulangi Manado
Email : Dasrilokiman@yahoo.com*

ABSTRAK

Tenaga Kerja dan lapangan pekerjaan masih menjadi bahasan menarik di kota Manado. Hampir setiap tahun, Tenaga Kerja atau buruh selalu memperlmasalahkan dan menuntut kesejahteraan yang lebih baik. Dilihat dari Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan oleh pemerintah kota Manado, dari tahun 2007 sampai tahun 2012 telah mengalami kenaikan, dan perkembangan realisasi Investasi Swasta selama periode tahun 2007 sampai tahun 2012 selalu berfluktuatif penelitian ini bertujuan untuk mengalisis bagaimana upah minimum provinsi dan investasi swasta berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, upah minimum provinsi berpengaruh terhadap PDRB, Investasi Swasta berpengaruh terhadap PDRB, dan apakah upah minimum provinsi dan investasi swasta melalui penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap PDRB. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Path dengan sumber data sekunder yang di ambil dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan Upah Minimum Provinsi dan Investasi Swasta memiliki pengaruh secara besama-sama terhadap Tenaga Kerja. secara parsial Upah Minimum Provinsi memiliki pengaruh terhadap tenaga kerja sedangkan Investasi Swasta tidak memiliki pengaruh terhadap tenaga kerja. Besarnya pengaruh Upah Minimum Provinsi ke PDRB melalui tenaga kerja bersifat positif, sedangkan Investasi Swasta ke PDRB melalui tenaga kerja bersifat negatif.

Kata Kunci : Upah Minimum Provinsi (UMP), Investasi Swasta, Tenaga Kerja dan PDRB

ABSTRACT

Labor and employment is still a topic of interest in the city of Manado. Almost every year, Labor or labor always questioning and demanding better welfare. Judging from the provincial minimum wage set by the government of the city of Manado, from 2007 to 2012 has been increased, and the development of Private Investment realization during the period 2007 to 2012 has always fluctuated, this research aims to mengalisis how provincial minimum wage and private investment affect the employment, the provincial minimum wage effect on GDP, private Investment effect on GDP, and whether the provincial minimum wage and private investment through the employment effect on GDP. The analysis technique used is the Path Analysis with secondary data taken from the relevant agencies. The results showed Provincial Minimum Wage and Private Investment in besama influence both against Labor. Provincial Minimum Wage partially have an influence on labor while private investment has no effect on employment. The magnitude of the effect of the Provincial Minimum Wage to GDP through labor is positive, while the Private Investment to GDP through labor is negative.

Keyword: Province Minimum Wage, Private Investment, Labor and GDP

1. PENDAHULUAN

Tenaga kerja dan lapangan pekerjaan masih menjadi bahasan yang menarik di Indonesia. Hampir setiap tahun, tenaga kerja atau buruh di Indonesia selalu turun ke jalan. Masalah yang dibawa selalu sama yakni soal kesejahteraan. Mereka selalu menuntut kesejahteraan yang lebih baik. Padahal, setiap tahun pemerintah selalu menaikkan upah minimum provinsi (UMP) yang dijadikan rujukan menentukan besaran upah bagi buruh. Tapi kenyataannya, buruh selalu meminta kenaikan gaji yang lebih besar.

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Salah satu tujuan penting dalam pembangunan ekonomi adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertumbuhan angkatan kerja, yang pertumbuhannya lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Masalah ketenagakerjaan bukan hanya sekedar keterbatasan lapangan atau peluang kerja serta rendahnya produktivitas namun jauh lebih serius dengan penyebab yang berbeda-beda. Pada dasarnya yang lalu, masalah pokoknya tertumpu pada kegagalan penciptaan lapangan kerja yang baru pada tingkat yang sebanding dengan laju pertumbuhan output industri. Seiring dengan berubahnya lingkungan makro ekonomi mayoritas negara-negara berkembang, angka pengangguran yang meningkat pesat terutama disebabkan oleh "terbatasnya permintaan" tenaga kerja, yang selanjutnya semakin dicitkan oleh faktor-faktor eksternal seperti memburuknya kondisi neraca pembayaran, meningkatnya masalah utang luar negeri dan kebijakan lainnya, yang pada gilirannya telah mengakibatkan kemerosotan pertumbuhan industri, tingkat upah, dan akhirnya, penyediaan lapangan kerja (Todaro, 2000:307).

Perluasan penyerapan tenaga kerja diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk ke pasar tenaga kerja. Ketidakeimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Kemudian, meningkatnya angka pengangguran akan mengakibatkan pemborosan sumber daya dan potensi angkatan kerja yang ada, meningkatnya beban masyarakat, merupakan sumber utama kemiskinan dan mendorong terjadinya peningkatan keresahan sosial, serta menghambat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Depnakertrans, 2004).

Salah satu faktor yang dapat menyerap tenaga kerja yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP). Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Propinsi. Menurut Permen no.1 Th. 1999 Pasal 1 ayat 1, Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan.

Dinas Tenaga Kerja Kota Manado tetap mengikuti ketentuan upah minimum provinsi Sulawesi Utara karena belum memiliki dewan pengupahan sendiri yang bisa merekomendasikan

besaran upah pekerja kepada pemerintah kota. Hingga sekarang Kota Manado belum punya dewan pengupahan sendiri karena ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan pemerintah kota sehingga belum terbentuk. Salah satu hal yang menjadi alasan Kota Manado belum memiliki dewan pengupahan adalah jika sudah memiliki, wajib menetapkan upah minimum lima persen lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP), yang sudah pasti akan memberatkan seluruh pengusaha di Kota Manado. Hal lain yang di khawatirkan adalah jika Upah Minimum Provinsi (UMP) di Kota Manado lebih tinggi dari provinsi, akan menyebabkan masuknya tenaga kerja besar-besaran ke kota ini, dan ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan di Kota Manado, dan penumpukan tenaga kerja. (Ubaidillah maaruf, antara sulut manado; 2012)

Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2007-2012 telah ditetapkan oleh Pemerintah kota manado yang dibantu oleh rekomendasi dari dewan pengupahan yang sebelumnya telah melakukan proses survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Secara nasional, UMP tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 3% hingga 19% sampai pada tahun 2012.

Pertumbuhan UMP dikota Manado terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan semakin meningkat Upah Minimum Provinsi (UMP) maka akan memacu setiap orang untuk bekerja. Dengan lebih meningkatnya UMP maka penyerapan tenaga kerja lebih banyak. Peningkatan jumlah investasi swasta yang ada di kota manado dari tahun 2003 sampai tahun 2005 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2006 sampai tahun 2010 mengalami penurunan, tetapi di tahun 2011 sampai tahun 2012 megalami peningkatan. Jumlah tenaga kerja yang ada di kota manado. dimana dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 mengalami peningkatan, namun di tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 jumlah tenaga kerja yang ada di kota manado mengalami penurunan. Sehingga semakin tinggi orang bekerja maka tingkat PDRB ikut meningkat, hal ini dibuktikan dengan tingkat PDRB di kota manado yang terus meningkat di tiap tahunnya.

Nilai realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) selama periode tahun 2007-2012 selalu berfluktuatif, dimana pada tahun 2007 ke tahun 2008 nilai realisasi PMDN di Kota Manado menurun dari Rp 30.000.000.000 menjadi Rp 22.000.000.000 akan tetapi sebagai akibat dari krisis ekonomi global yang tengah melanda dunia dan pembangunan di segala sektor ekonomi pada tahun 2008 mengakibatkan terjadinya penurunan yang sangat tajam terhadap realisasi PMDN di Kota Manado pada tahun 2009 yaitu Rp 990.165.045 dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2010 yaitu sebesar Rp 990.000.000, kemudian pada tahun - tahun berikutnya yaitu tahun 2011 dan tahun 2012 PMDN mulai mengalami peningkatan lagi yaitu sebesar Rp 14.050.000.000 dan tahun 2012 naik sebesar Rp 110.096.353.000.

Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk berumur 10 tahun ke atas terbagi sebagai angkatan kerja (AK) dan bukan AK. Angkatan kerja dikatakan bekerja bila mereka melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara kontiniu selama seminggu yang lalu. Sedangkan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan disebut menganggur (Budi santosa, 2001). Payaman J. Simanjuntak (1985) menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan dan ,melakukan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Jumlah angkatan kerja yang sedang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia.

Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia maka akan menyebabkan semakin meningkatkan total produksi di suatu daerah.

Menurut Payaman Simanjuntak (2001:3), angkatan kerja adalah jumlah orang yang bekerja dan pencari kerja. Dimana yang dinamakan golongan orang yang bekerja yakni mereka yang sudah aktif dalam kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan yang dinamakan golongan pencari kerja yakni mereka yang siap bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Kelompok angkatan kerja terdiri dari 3 golongan yakni : (1) golongan yang masih bersekolah yaitu mereka yang kegiatannya hanya atau teruma bersekolah; (2) golongan yang mengurus rumah tangga yaitu mereka yang mengurus rumah tangga tanpa memperoleh upah; dan (3) golongan lain-lain. Yang termasuk golongan lain-lain ini ada dua macam yakni; a) penerima pendapat yaitu mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan ekonomi tetapi memperoleh pendapatan seperti tunjangan pension, bunga atas simpanan atau sewa atas milik; b) mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain misalnya karena lanjut usia, cacat, dalam penjara atau sakit kronis.

Pada suatu waktu dan tingkat teknologi tertentu, ada hubungan antara jumlah input tenaga kerja dan jumlah outputnya. Dengan hukum hasil lebih yang makin berkurang (*law of diminishing return*), setiap tambahan satu unit input tenaga kerja akan menambah output dengan tingkat yang semakin mengecil. (Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus). Pasar tenaga kerja, sama halnya dengan pasar-pasar lainnya dalam perekonomian diatur oleh kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran. Ketidak seimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja akan menentukan tingkat upah (Mankiw, 2003: 4). Menurut Ricardo (Deliarnov, 2009:53) nilai tukar suatu barang ditentukan oleh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut, yaitu biaya bahan mentah dan upah buruh yang besarnya hanya untuk bertahan hidup (subsisten) bagi buruh yang bersangkutan. Upah sebesar ini disebut sebagai upah alami (*natural wage*). Besarnya tingkat upah alami ini ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan setempat. Tingkat upah alami naik proporsional dengan standar hidup masyarakat. Sama halnya dengan harga-harga lainnya, harga tenaga kerja (upah) ditentukan oleh permintaan dan penawaran, maka dalam kondisi ekuilibrium, secara teoritis para pekerja akan menerima upah yang sama besarnya dengan nilai kontribusi mereka dalam produksi barang dan jasa (Mankiw, 2003:11).

Menurut Permen no.1 Th. 1999 Pasal 1 ayat 1, Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan.

Menurut Sukirno (2004), investasi didefinisikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa yang akan datang. Dengan kata lain dalam teori ekonomi, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. Secara umum investasi meliputi penambahan barang dan jasa dalam masyarakat seperti penambahan mesin-mesin baru, pembuatan jalan baru, lahan baru dan sebagainya.

Investasi tidak hanya untuk memaksimalkan output tetapi untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi. Sedangkan, Dombush & Fisher berpendapat bahwa investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan dimasa mendatang.

Menurut Todaro (2003) persyaratan umum pembangunan ekonomi suatu Negara adalah pertama, akumulasi modal. Dalam hal ini termasuk akumulasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia. Kedua, perkembangan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja dan keahliannya. Ketiga, kemajuan teknologi. Akumulasi modal akan berhasil apabila beberapa bagian atau proporsi pendapatan yang ada ditabung dan diinvestasikan untuk memperbesar produk (output) dan pendapatan di kemudian hari. Untuk membangun itu seyogyanya mengalihkan sumber-sumber dari arus konsumsi dan kemudian mengalihkannya untuk investasi dalam bentuk "*capital formation*" untuk mencapai tingkat produksi yang lebih besar. Investasi dibidang pengembangan sumberdaya manusia akan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, sehingga menjadi tenaga ahli yang terampil yang dapat memperlancar kegiatan produktif.

Menurut Jhingan (1996), investasi atau pembentukan modal merupakan jalan keluar utama dari masalah negara terbelakang ataupun berkembang dan kunci utama menuju pembangunan ekonomi. Hal ini sebagaimana juga dipertegas oleh Nurkse (1996) bahwa lingkaran setan kemiskinan di negara terbelakang atau berkembang dapat digunting melalui investasi atau pembentukan modal. Lebih rinci lagi dikatakan oleh Todaro (1981) bahwa persyaratan umum pembangunan ekonomi suatu negara adalah:

1. Akumulasi modal, termasuk akumulasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia;
2. Perkembangan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja dan keahliannya;

Menurut Irawan dan Suparmoko (1992), ada beberapa teori yang dapat menjelaskan seberapa besar tingkat investasi yang dapat diusahakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara ataupun wilayah, yaitu :

1. Teori Usaha Perlahan-lahan (*Gradualist Theory*)

Teori ini berpendapat bahwa negara yang terbelakang sebaiknya jangan mengadakan industrialisasi cepat-cepat sebab resiko dan kekeliruan-kekeliruan akan terlalu besar untuk dipikul. Injeksi kapital yang banyak adalah kurang baik sampai perekonomian tersebut mampu menyerapnya. Pemilihan teknik-teknik produksi dan investasi didasarkan pada biaya-biaya relatif daripada faktor-faktor produksi. Harus diusahakan untuk memajukan industri-industri kecil, pembangunan masyarakat desa yang menggunakan kelebihan tenaga buruh. Kegiatan yang membutuhkan kapital yang banyak akan diusahakan bila keuntungan melebihi dari kegiatan yang sifatnya padat karya (*labor intensive*).

2. Teori Dorongan Besar (*Big Push*)

Teori ini secara singkat mengatakan bahwa bila hanya ada sedikit-sedikit usaha untuk menaikkan pendapatan, hal ini hanya mendorong pertumbuhan penduduk saja yang nantinya akan menghambat kenaikan pendapatan perkapita. Oleh karena itu, usaha harus dilaksanakan

secara besar-besaran untuk mengatasi perubahan-perubahan penduduk. Implikasinya ialah harus diadakan investasi besar-besaran untuk menghilangkan kemiskinan, memaksimalkan output dengan menggunakan teknik yang paling produktif yang kadang-kadang membutuhkan kapital yang besar. Konsentrasi pada investasi yang selanjutnya menghasilkan alat-alat kapital untuk mempertahankan pendapatan dan pertumbuhan output. Konsumsi sebaliknya ditekan, sehingga investasi dapat terus ada. Titik berat pada “*economic of scale*” yang berupa produksi massa (*large scale production*) dan tentunya juga membutuhkan kapital yang banyak.

3. Teori Pembangunan Seimbang (*Balanced Growth*)

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Rosenstein-Rodan (1953), yang menitikberatkan bahwa perekonomian itu ada kemungkinan untuk berkembang apabila ada perimbangan yang baik antara berbagai-bagai sektor di dalam perekonomian. Dengan pertumbuhan seimbang (*balanced growth*) ini diartikan bahwa perkembangan ekonomi tidak akan berhasil bila investasi hanya sebatas pada “titik pertumbuhan” (*growing point*) tertentu atau sektor-sektor yang sedang berkembang saja, sebab sektor-sektor lain berhubungan erat. Investasi harus disebar pada semua sektor sehingga memperluas pasar antara satu sektor dengan sektor lainnya. Makin erat hubungan saling ketergantungan antar berbagai sektor maka pasar akan semakin kuat. Untuk mewujudkan teori ini tentu saja harus didukung oleh investasi yang besar.

4. Teori Pembangunan Tidak Seimbang (*Unbalanced Growth*)

Teori ini dikemukakan oleh Hirschman (1992) yang pada awalnya mengkritik teori pembangunan seimbang. Menurutnya bahwa masyarakat yang masih rendah tingkat pendapatannya tidak dapat merubah sistem perekonomian yang tradisional menjadi sistem yang modern. Disamping itu, kapital yang besar tidak dapat disediakan oleh negara yang masih berkembang. Justru dengan tidak adanya keseimbangan akan mendorong kemajuan ekonomi yang lebih cepat dan biaya-biaya ekspansi dapat diminimumkan. Bila satu sektor masih rendah outputnya maka akan tetap ada permintaan yang banyak di sektor lain dan akan ada suatu keuntungan super normal pada sektor yang rendah outputnya.

Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro dan Smith, 2003).

Beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan daerah dari suatu daerah haruslah mencakup tiga inti nilai (Todaro dan Smith 2003)

1. Ketahanan (*Sustenance*): Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan, papan, kesehatan dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.
2. Harga diri (*Self Esteem*): Pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu
3. *Freedom from servitude*: Kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

PDRB merupakan penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten /kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kelender). Kegiatan ekonomi yang dimaksud kegiatan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan jasa. Dalam penghitungannya, untuk menghindari hitung ganda, nilai output bersih diberi nama secara spesifik, yaitu nilai tambah (*value added*). Demikian juga, harga yang digunakan dalam perhitungan ini adalah harga produsen. Penilaian pada harga konsumen akan menghilangkan PDRB subsektor perdagangan dan sebagian subsektor pengangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tujuan penetapan upah minimum adalah untuk meningkatkan taraf hidup pekerja sesuai dengan kebutuhannya hidup minimalnya, oleh karena itu penetapan upah minimum didasarkan atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Indonesia telah menerapkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Dengan adanya kebijakan ini, wewenang untuk menetapkan tingkat upah minimum dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di tingkat propinsi, kabupaten, dan kota. Terdapat tanda-tanda awal bahwa pengalihan wewenang ini mungkin akan semakin meningkatkan kenaikan upah minimum di beberapa daerah.

Dalam penelitian yang dilakukan SMERU, Dengan dukungan dari USAID/PEG pada bulan Oktober 2001, Kebijakan upah minimum yang dilaksanakan dengan ketat akan membantu para pekerja yang lebih produktif yang dapat mempertahankan pekerjaannya di sektor modern. Namun kecil kemungkinannya bahwa para pekerja ini berada dalam kelompok yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berbagai hasil studi menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok miskin adalah mereka yang bekerja di sektor informal perkotaan dan di perdesaan. Bila kebijakan upah minimum mengurangi tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor modern hingga di bawah pertumbuhan jumlah angkatan kerja, maka pekerja yang tidak mempunyai keterampilan mungkin akan terpaksa memasuki pekerjaan-pekerjaan yang lebih rendah tingkatnya di sektor informal. Hal ini menunjukkan bahwa dampak upah minimum terhadap ketenagakerjaan di sektor modern hanya merupakan sebagian dari keseluruhan cerita lengkapnya.

Dampak upah minimum terhadap kesejahteraan pekerja di sektor informal, yang merupakan sebagian besar dari angkatan kerja di Indonesia, mungkin sama pentingnya atau bahkan lebih penting lagi. Salah satu bidang yang penting untuk dikaji di waktu yang akan datang adalah bagaimana dampak pengurangan kesempatan kerja di sektor modern dari upah minimum berpengaruh terhadap penghasilan riil dari mereka yang bekerja di sektor informal.

Kemajuan teknologi akan meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya produksi, dengan demikian kemajuan teknologi yang berlaku diberbagai kegiatan ekonomi akan mendorong lebih banyak investasi, semakin besar biaya yang diperlukan untuk melakukan perombakan dalam teknologi yang digunakan, semakin banyak investasi yang akan dilakukan. Hubungan investasi dengan penyerapan tenaga kerja dinyatakan oleh Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi akan tercapai jika tenaga kerja memperoleh upah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan yang bersifat ekonomi maupun kebutuhan yang bersifat non ekonomi dan bukan hanya sekedar dapat memenuhi kebutuhan layak. (Sulistiawati, 2012)

Bentham (Pressman, 2002:37-39), yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness (welfare) of the greatest number of their citizens*. Pemerintah menjadi mekanisme untuk membantu meningkatkan kesejahteraan warganya antara lain melalui berbagai kebijakan di bidang ekonomi dan sosial. (Sulistiawati, 2012)

Investasi adalah kata kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena di samping akan mendorong kenaikan output secara signifikan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat. Makmun dan Yasin (2003 : 63). Tujuan negara Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Secara teoritis, masalah kemiskinan, pengangguran atau kesempatan kerja akan dapat di atasi dengan memaksimalkan investasi yang produktif di berbagai sektor ekonomi. Keberhasilan pertumbuhan PDRB, tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya investasi.

Oktaviana Dwi Saputri (2011) meneliti mengenai “Analisis penyerapan tenaga kerja di kota salatiga”. Kaitannya dengan penelitian ini karena sama-sama meneliti pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja, meskipun objek yang diteliti berbeda (*path analysis*).

Paul SP Hutagalung (2013) meneliti mengenai “Analisis pengaruh upah minimum dan inflasi terhadap kesempatan kerja sektor industri pengolahan besar dan sedang di jawa tengah”.Kaitannya denga penelitian ini sama-sama meneliti pengaruh tingkat upah minimum.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan UMP di jawa tengah paling signifikan terjadi pada tahun 1994, yaitu mencapai 80% dari tahun 1993.

Rini Sulistiawati (2012) meneliti mengenai “Pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarkat di provinsi di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, upah minimum berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di indonesia dan Penyerapan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di indonesia. Alat analisis ini regresi linear berganda, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian eksplanatori, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variable-variabel melalui pengujian hipotesis.

Deddy Rustiono, 2008. Meneliti mengenai “Analisi pengaruh investasi, tenaga kerja dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di jawah tengah”. Penelitian ini menggunakan model regresi log linear dengan metode kuadrat terkecil (OLS). Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel ($4,499 > 2,81$) sehingga H_0 di terima dan H_1 ditolak, berarti secara bersama-sama variable PMDN,PMA,tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dijawah tengah.

2. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang menggunakan data deret berkala (*time series*), atau runtut waktu selama sepuluh tahun yaitu dari tahun 2003-2012. Data diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, dalam hal ini dari dinas-dinas atau instansi pemerintah, diantaranya adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Manado dan Badan Pusat Statistika

Untuk mendapatkan dan pengumpulan data yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini diperoleh data-data Upah Minimum Provinsi, Investasi Swasta, Tenaga Kerja dan Data Kesejahteraan Masyarakat kota Manado sejak tahun 2002-2012 yang di dapat dari perpustakaan Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara yang beralamat di Jln. 17 agustus Manado dan mengakses situs badan pusat statistik.

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan data sekunder yaitu dokumentasi dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pokok bahasan yang penulis kutip dari buku, catatan atau laporan histories yang telah tersusun dalam arsip(data documenter yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan) yang berasal dari perpustakaan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara mengenai Jumlah Upah Minimum Provinsi (UMP), Ivestasi Swasta, Tenaga Kerja, serta PDRB di Kota Mando (Periode 2003-2012).

Analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis induktif atau analisis inferensia. Analisis deskriptif ditujukan untuk memberikan gambaran awal tentang dana alokasi umum, belanja langsung, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan dikota manado. Sedangkan analisis statistik inferensia adalah berupa regresi sederhana, regresi berganda dan analisis jalur (*path analysis*).Metodeanalisis Analisis jalur (*path analysis*) yaitu untuk mengetahui Pengaruh Variabel Independen Exogenus terhadap Variabel Dependen Endogenus.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.2.1
Hasil Pengujian Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		UMP	Investasi Swasta	Tenaga Kerja
N		10	10	10
Normal Parameters ^a	Mean	5.8868	11.0834	5.2239
	Std. Deviation	.14682	.59730	.02454
Most Extreme Differences	Absolute	.110	.273	.190
	Positive	.080	.171	.190
	Negative	-.110	-.273	-.143
Kolmogorov-Smirnov Z		.347	.863	.602
Asymp. Sig. (2-tailed)		1.000	.445	.861

Sumber : Hasil Pengolahan Data,2014

Berdasarkan tabel 4.2.1 diatas maka terlihat bahwa nilai uji Kolmogorov-Smirnov test menunjukkan bahwa nilai uji masing-masing variabel adalah 1.000 UMP, 0.445 investasi swasta, 0,861 tenaga kerja. Nilai Kolmogorov-Smirnov masing-masing varibale tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah terdistribusi normal.

Tabel 4.2.2
Nilai VIF yang digunakan dalam Penelitian
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
		B	Std. Error	Beta			VIF
1	(Constant)	4.624	.278		16.632	.000	
	UMP	.119	.040	.711	2.982	.020	1.043
	Investasi Swasta	-.009	.010	-.220	-.922	.387	1.043

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2014

Berdasarkan hasil perbaikan model penelitian sebagaimana yang tercantum dalam tabel 4.2.2 diatas maka variabel bebas yang akan digunakan dalam persamaan regresi penelitian adalah variabel UMP, dan investasi swasta. Hal ini didasarkan pada hasil uji nilai VIF yang menunjukkan besarnya nilai VIF antara X1 UMP 1.043, X2 invstasi swasta 1.043, variabel bebas tersebut lebih kecil dari 10. Aturan dalam program SPSS bahwa jika nilai VIF variabel bebas lebih kecil dari angka 10, maka kedua variabel tersebut tidak mengandung multikolinearitas

Berdasarkan Gambar Kurva uji *heterokedastisitas* hasil perbaikan model maka terlihat penyebaran residu adalah tidak teratur dengan plot yang menyebar dan tidak membentuk pola tertentu yang sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala homokedastisitas dalam model penelitian, sehingga dengan demikian persamaan regresi yang akan digunakan telah memenuhi asumsi *heterokedastisitas* yakni varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak memiliki kesamaan atau tidak membentuk pola tertentu sebagaimana yang terlihat dalam *scatterplot* tersebut.

Tabel 4.2.3
Nilai Koefisien dan Uji t
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.624	.278		16.632	.000
	UMP	.119	.040	.711	2.982	.020
	Investasi Swasta	-.009	.010	-.220	-.922	.387

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2014

Berdasarkan data output SPSS dalam tabel ini maka dapat diberi interpretasi sebagai berikut :

- Persamaan regresi dari penelitian ini adalah $X_3 = 4,624 - 0,119 X_1 - 0,009 X_2$

- Nilai konstanta sebesar 3.306 mengandung arti bahwa jika nilai UMP, dan investasi swasta adalah sebesar 0, maka tenaga kerja akan sebesar 4,624 (tetap).
- Nilai koefisien regresi X1 sebesar 0,119 mengandung arti bahwa jika UMP bertambah sebesar 1% maka tenaga kerja akan berkurang sebesar 11,9%
- Nilai koefisien regresi X2 sebesar -0,009, mengandung arti bahwa jika investasi swasta bertambah 1% maka tenaga kerja juga akan berkurang sebesar -0,009 % ceteris paribus.
- Nilai thitung UMP X1 adalah 4,624 Nilai t tabel adalah 1,895 yang diperoleh dengan Alpha 5 % dan df sebesar 3 yakni (10-2-1). Pada sisi yang lain nilai signifikansinya X1 (Sig) adalah 0.020 atau lebih kecil dari nilai Alpha sebesar 0,05. Oleh karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, dan nilai sig lebih besar dari nilai alpha berarti Ho ditolak. Hal ini berarti bahwa UMP memiliki pengaruh secara parsial terhadap tenaga kerja.
- Nilai thitung investasi swasta X2 adalah 0.119 Nilai t tabel adalah 1,895 yang diperoleh dengan Alpha 5 % dan df sebesar 3 yakni (10-2-1). Pada sisi yang lain nilai signifikansinya X1 (Sig) adalah 0.387 atau lebih besar dari nilai Alpha sebesar 0,05. Oleh karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, dan nilai sig lebih kecil dari nilai alpha berarti Ho diterima. Hal ini berarti bahwa investasi swasta tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap tenaga kerja.

Tabel 4.2.4
Uji Korelasi, Kontribusi, dan Pengaruh Simultaan
Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.786 ^a	.618	.509	.01719

a Predictors: (Constant), Investasi swasta, UMP

b Dependent Variable: tenaga kerja

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2014

Berdasarkan tabel 4.2.4 diatas maka interpretasi adalah sebagai berikut :

- Nilai koefisien korelasi adalah sebesar 0,768. Besaran nilai koefisien korelasi ini mengandung arti bahwa keeratan hubungan antara UMP, Investasi swasta, sebagai variabel bebas dengan tenaga kerja sebagai variable terikat adalah sangat erat dan bersifat positif.
- Nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,618 atau 61.8 persen. Besaran nilai koefisien determinasi sebesar 61,8 persen mengandung arti bahwa kontribusi atau sumbangan variable UMP, investasi swasta secara bersama-sama terhadap tenaga kerja adalah sebesar 61,8 persen sedangkan sisanya 38,2 persen disumbangkan oleh variabel lain.

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.003	2	.002	5.667	.034 ^a
	Residual	.002	7	.000		
	Total	.005	9			

Nilai F hitung sebesar 5,667 dengan signifikansi 0,024. Nilai Ftabel 5 %, dengan jumlah variabel bebas (v1) = 3 dan jumlah sampel 8 , maka diperoleh nilai Ftabel 4.10. Nilai Fhitung (6.605) lebih besar dari nilai Ftabel (4.10). Berdasarkan hasil uji F maka variabel bebas UMP, dan investasi swasta secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh terhadap tenaga kerja sebagai variabel terikat.

Adapun model persamaan regresi linier sederhana yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 2.880 + 0.646 X$$

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.880	.341		8.450	.000
	UMP	.646	.058	.969	11.156	.000

- Nilai konstanta sebesar 2.880 mengandung arti bahwa jika nilai PDRB adalah sebesar 0%, UMP akan sebesar 2.880%. (tetap)
- Nilai koefisien regresi X1 sebesar 0.646 mengandung arti bahwa jika UMP bertambah sebesar 1% maka PDRB akan bertambah sebesar 0.646%. ceteris paribus.
- Nilai thitung UMP adalah 11.156, nilai t tabel adalah 1,833 yang diperoleh dengan Alpha 5 % dan df sebesar 10 yakni (10-1). Pada sisi yang lain nilai signifikansinya X1 (Sig) adalah 0.000 atau lebih besar dari nilai Alpha sebesar 0,05. Oleh karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, dan nilai sig lebih besar dari nilai alpha berarti Ho ditolak. Hal ini berarti bahwa UMP memiliki pengaruh terhadap PDRB.

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.081	1	.081	124.448	.000(a)
	Residual	.005	8	.001		
	Total	.086	9			

Nilai F hitung sebesar 124.448 dengan signifikansi 0,000. Nilai Ftabel 5 %, dengan jumlah variabel bebas (v1) = 1 dan jumlah sampel 10 , maka diperoleh nilai Ftabel 5.12. Nilai Fhitung (124.448) lebih besar dari nilai Ftabel (5.12). Berdasarkan hasil uji F maka variabel bebas UMP memiliki pengaruh terhadap PDRB sebagai variabel terikat.

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.969(a)	.940	.932	.02549	.918

Dari nilai Adjusted R Square menunjukkan nilai sebesar 0.940 = 94.0 %. Artinya bahwa variabel Y PDRB dipengaruhi sebesar 94.0%, sedangkan sisanya 0.6 % dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Adapun model persamaan regresi linier sederhana yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 7.108 - 0.039 X$$

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.108	.624		11.388	.000
	Investasi swasta	-.039	.056	-.236	-.687	.511

- Nilai konstanta sebesar 7.108 mengandung arti bahwa jika nilai PDRB adalah sebesar Rp 0 investasi swasta akan sebesar Rp 7.108 (tetap)
- Nilai koefisien regresi X sebesar -0,039 mengandung arti bahwa jika Investasi Swasta bertambah sebesar 1% maka PDRB akan berkurang sebesar -0,039 %. ceteris paribus.
- Nilai thitung Investasi Swasta adalah -0.687, nilai t tabel adalah 1,833 yang diperoleh dengan Alpha 5 % dan df sebesar 10 yakni (10-1). Pada sisi yang lain nilai signifikansinya X1 (Sig) adalah 0.511 atau lebih besar dari nilai Alpha sebesar 0,05. Oleh karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, dan nilai sig lebih besar dari nilai alpha berarti Ho diterima. Hal ini berarti bahwa investasi swasta tidak memiliki pengaruh terhadap PDRB.

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.005	1	.005	.472	.511(a)
	Residual	.081	8	.010		
	Total	.086	9			

Nilai F hitung sebesar 0.472 dengan signifikansi 0,511. Nilai Ftabel 5 %, dengan jumlah variabel bebas (v1) = 1 dan jumlah sampel 10 , maka diperoleh nilai Ftabel 5.12. Nilai Fhitung (0.472) lebih besar dari nilai Ftabel (5.12). Berdasarkan hasil uji F maka variabel bebas investasi swasta tidak memiliki pengaruh terhadap PDRB sebagai variabel terikat.

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.236(a)	.056	-.062	.10078

Dari nilai Adjusted R Square menunjukkan nilai sebesar 0.056 = 05.6 %. Artinya bahwa variabel Y PDRB dipengaruhi sebesar 05.6 %, sedangkan sisanya 95 % dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Uji normalitas data dapat dilihat dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov test. Hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.6
Hasil Pengujian Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		UMP	Investasi swasta	tenaga kerja	PDRB
N		10	10	10	10
Normal Parameters(a,b)	Mean	5.8868	11.0834	2.5089	6.6800
	Std. Deviation	.14682	.59730	.02453	.09778
Most Extreme Differences	Absolute	.110	.273	.220	.115
	Positive	.080	.171	.220	.115
	Negative	-.110	-.273	-.168	-.096
Kolmogorov-Smirnov Z		.347	.863	.695	.363
Asymp. Sig. (2-tailed)		1.000	.445	.720	.999

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2014

Berdasarkan tabel 4.2.6 diatas maka terlihat bahwa nilai uji Kolmogorov-Smirnov test menunjukkan bahwa nilai uji masing-masing variabel adalah 1.000 UMP, 0.445 investasi swasta, 0,720 tenaga kerja, dan 0.999 PDRB. Nilai Kolmogorov-Smirnov masing-masing varibale tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah terdistribusi normal.

ASUMSI KLASIK

Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil perbaikan model penellitian sebagaimana yang tercantum dalam tabel 4.2.7 diatas maka variabel bebas yang akan digunakan dalam persamaan regresi penelitian adalah variabel UMP, investasi swasta, dan tenaga kerja. Hal ini didasarkan pada hasil uji nilai VIF yang menunjukkan besarnya nilai VIF antara X1 UMP 2.369, X2 invstasi 1.170, dan X3 tenaga kerja 2.619 variabel bebas tersebut lebih kecil dari 10,. Aturan dalam program SPSS bahwa jika nilai VIF variabel bebas lebih kecil dari angka 10, maka kedua variabel tersebut tidak mengandung multikolinearitas.

Tabel 4.2.7 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	VIF
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	1.516	2.928		.518	.623	
UMP	.602	.099	.904	6.061	.001	2.369
Investasi Swasta	-.004	.017	-.023	-.219	.834	1.170
Tenaga Kerja	.318	.625	.080	.508	.629	2.619

Uji Heterokedastisitas

Variabel bebas penelitian yang telah bersih dari gejala multikolinearitas (variabel modal kerja dan variabel pengalaman kerja) diuji kembali dengan pengujian heterokedastisitas. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Gambar Kurva uji *heterokedastisitas* hasil perbaikan model maka terlihat penyebaran residu adalah tidak teratur dengan plot yang menyebar dan tidak membentuk pola tertentu yang sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala homokedastisitas dalam model penelitian, sehingga dengan demikian persamaan regresi yang akan digunakan telah memenuhi asumsi *heterokedastisitas* yakni varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak memiliki kesamaan atau tidak membentuk pola tertentu sebagaimana yang terlihat dalam *scatterplot* tersebut diatas.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Tabel 4.2.8 Nilai Koefisien dan Uji t

Coefficients(a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.168	2.265		1.399	.211
UMP	.633	.113	.950	5.605	.001
Investasi swasta	-.007	.017	-.040	-.401	.703
tenaga kerja	-.055	.670	-.014	-.083	.937

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2014

Berdasarkan data output SPSS dalam tabel ini maka dapat diberi interpretasi sebagai berikut :

- Persamaan regresi dari penelitian ini adalah $Y = 1,516 + 0,602 X_1 - 0,004 X_2 - 0,318 X_3$
- Nilai konstanta sebesar 1,516 mengandung arti bahwa jika nilai UMP, dan investasi swasta, tenaga kerja adalah sebesar 0, maka PDRB akan sebesar Rp 1,516 (tetap).

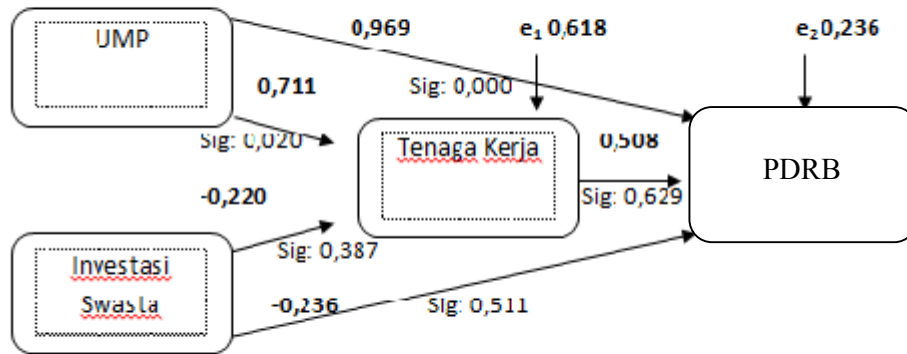
- Nilai koefisien regresi X1 sebesar 0.602 mengandung arti bahwa jika UMP bertambah sebesar 1% maka PDRB akan bertambah sebesar 0.602 %.
- Nilai koefisien regresi X2 sebesar -0.004, mengandung arti bahwa jika investasi swasta bertambah 1% maka PDRB juga akan berkurang sebesar 0.004% ceteris paribus.
- Nilai koefisien regresi X3 sebesar 0,318, mengandung arti bahwa jika tenaga kerja bertambah 1 % maka PDRB juga akan berkurang sebesar 0,318 %.
- Nilai thitung UMP X1 adalah 6,061, Nilai t tabel adalah 1,943 yang diperoleh dengan Alpha 5 % dan df sebesar 3 yakni (10-3-1). Pada sisi yang lain nilai signifikansinya X1 (Sig) adalah 0.001 atau lebih kecil dari nilai Alpha sebesar 0,05. Oleh karena nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel, dan nilai sig lebih besar dari nilai alpha berarti Ho ditolak. Hal ini berarti bahwa UMP memiliki pengaruh secara terhadap PDRB.
- Nilai thitung investasi swasta X2 adalah -0.219 Nilai t tabel adalah 1,943 yang diperoleh dengan Alpha 5 % dan df sebesar 3 yakni (10-2-1). Pada sisi yang lain nilai signifikan X2 (Sig) adalah 0.703 atau lebih besar dari nilai Alpha sebesar 0,05. Oleh karena nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel, dan nilai sig lebih besar dari nilai alpha berarti Ho diterima. Hal ini berarti bahwa investasi swasta tidak memiliki pengaruh terhadap PDRB.
- Nilai thitung tenaga kerja X3 adalah 0,508 Nilai t tabel adalah 1,943 yang diperoleh dengan Alpha 5 % dan df sebesar 3 yakni (10-2-1). Pada sisi yang lain nilai signifikansinya X3 (Sig) adalah 0.629 atau lebih besar dari nilai Alpha sebesar 0,05. Oleh karena nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel, dan nilai sig lebih besar dari nilai alpha berarti Ho diterima. Hal ini berarti bahwa tenaga kerja tidak memiliki pengaruh terhadap PDRB.

Tabel 4.2.9 Uji Korelasi, Kontribusi, dan Pengaruh Simultaan

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.081	3	.027	33.460	.000 ^a
	Residual	.005	6	.001		
	Total	.086	9			

Nilai F hitung sebesar 33.460 dengan signifikansi 0,000. Nilai Ftabel 5 %, dengan jumlah variabel bebas (v1) = 3 dan jumlah sampel 10, maka diperoleh nilai Ftabel 4.10. Nilai Fhitung (33.460) lebih besar dari nilai Ftabel (3.71). Berdasarkan hasil uji F maka variabel bebas UMP, investasi swasta, dan tenaga kerja secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh terhadap PDRB sebagai variabel terikat.

Diagram jalur pengaruh X1 dan X2 terhadap X3 melalui Y1



Pengaruh langsung UMP ke PDRB
 = X1 (0,969)

Pengaruh tidak langsung UMP ke PDRB melalui tenaga kerja
 = (X1 0,969 x X2 -0,236) = -0,228

Pengaruh total (UMP ke PDRB melalui tenaga kerja)
 = X1 (0,969) + (X1 0,969 x X3 0,508)
 = 0,696 + 0,492
 = 1,188

Pengaruh langsung investasi swasta ke PDRB
 =X2 (-0,220)

Pengaruh tidak langsung Investasi swasta ke PDRB melalui Penyerapan tenaga kerja
 = X2 (-0,220) x X3 (0,508) = -0,111

Pengaruh total (investasi swasta ke PDRB melalui tenaga kerja)
 = X2 (-0,220) + (X2 (-0,220) x X3 (0,508))
 = -0,220 + -0,111
 = -0,331

$$Y1 = X1Y1 (0,711) + e1 (0,618) = 1.329$$

$$Y1 = X2Y1 (-0,220) + e1 (0,618) = 0.398$$

$$Y2 = X1Y2 (0,969) + X3Y2 (0,508) + e2 (0,236) = 1.713$$

$$Y2 = X2Y2 (-0,236) + X3Y2 (0,508) + e2 (0,236) = 0.508$$

PEMBAHASAN

Besarnya antara variabel bebas X1 UMP dan X2 investasi swasta terhadap X3 tenaga kerja memiliki pengaruh secara bersama-sama (simultan).

Untuk variabel bebas X1 memiliki pengaruh terhadap variabel terikat X3 tenaga kerja, karena jika UMP bertambah maka penyerapan tenaga kerja akan bertambah.

Untuk variabel bebas X2 tidak memiliki pengaruh terhadap variabel X3 tenaga kerja, karena investasi swasta yang ada di kota Manado bersifat padat modal, dimana investasi swasta saat ini yang ditanamkan oleh para investor adalah investasi pembangunan infrastruktur yang menggunakan alat-alat produksi terkemuka dan pembangunan yang ada menggunakan tenaga kerja dari luar Manado, kemudian kebanyakan barang-barang yang dijual adalah barang yang dari luar Manado sehingga tidak menunjang untuk pembangunan di kota Manado.

Besarnya pengaruh UMP ke PDRB melalui tenaga kerja bersifat positif, hal ini dapat dinyatakan bahwa tenaga kerja dapat dijadikan variabel intervening. Besarnya pengaruh investasi ke PDRB melalui tenaga kerja, hal ini dapat dinyatakan bahwa tenaga kerja tidak dapat dijadikan variabel intervening karena bersifat negatif.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang dilakukan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Dari analisis di atas menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Investasi Swasta memiliki pengaruh secara bersama-sama simultan terhadap Tenaga Kerja.
2. Dari analisis menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki pengaruh terhadap tenaga kerja kota Manado.
3. Dari analisis menunjukkan bahwa variabel Investasi Swasta tidak memiliki pengaruh terhadap tenaga kerja kota Manado.
4. Besarnya pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) ke PDRB melalui tenaga kerja bersifat positif, sehingga tenaga kerja dapat berfungsi sebagai variabel intervening antara UMP terhadap PDRB Kota Manado.
5. Besarnya pengaruh Investasi Swasta ke PDRB melalui tenaga kerja bersifat negatif, sehingga tenaga kerja tidak dapat berfungsi sebagai variabel intervening antara Investasi Swasta terhadap PDRB Kota Manado.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Mustika CD. 2010. *Analisis Tingkat Pengangguran Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya di Kota Semarang*.
- Boediono, 1992, Teori Pertumbuhan Ekonomi, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu ekonomi, Edisi 1, Cetakan Ke 5, BPFE, Jogjakarta.
- Deddy, Rustiono. 2008. *Analisis pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. UNDIP. Semarang.
- Deliarnov 2009. *Perkembangan pemikiran ekonomi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometrika Dasar* : Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *“Teori Makro Ekonomi”*. Edisi Keempat. Terjemahan. Jakarta : Penerbit Airlangga.
- Oktaviana Dwi Saputri 2011 Analisis Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Salatiga, Semarang.
- Payaman Simanjuntak. 1998. *Pengantar ekonomi sumberdaya manusia*. Penerbit FEUI (Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia).
- Rini Sulistiawati, 2012. Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012 hal 195 - 211.
- Simanjuntak, Payaman, J. 2002. *Undang-Undang yang Baru tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh*. Kantor Perburuhan Internasional: Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2000 *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru Raja*. Grafindo Pustaka. Jakarta.
- Tim Peneliti SMERU Laporan dari Lembaga Penelitian SMERU, dengan dukungan dari USAID/PEG Dampak Kebijakan Upah Minimum terhadap Tingkat Upah dan Penyerapan Tenaga Kerja di Daerah Perkotaan Indonesia.
- Todaro, P. Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Todaro. M.P & Smith S.C. 2003, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ke Delapan. Erlangga. Jakarta
- Ubaidillah Maaruf, 2012 Upah Minimum Kota Manado Ikut Provinsi Sulut
<http://www.scribd.com/doc/193187501/Analisis-Penyerapan-Tenaga-Kerja-Sektoral-Di-Jawa-Tengah-Pendekatan-Demotrik>.
- <http://andamifardela.wordpress.com/2011/05/13/investasi-dan-penanaman-modal/>
<http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2013/04/17/pengertian-upah-minimum-547095.html>